

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN MERAUKE

Fransina Latupeirissa<sup>1</sup>, Syahrudin<sup>2\*</sup>, Alexander P. Tjilen<sup>3</sup>, Nurlinda Yani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

<sup>4</sup> Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke, Merauke, Indonesia

\*Korespondensi : syahrudin@unmus.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke dengan menelaah kesesuaiannya terhadap karakter sosial, budaya, dan ekologis wilayah. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menggali dinamika implementasi kebijakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas adat, petani, serta pelaku usaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Merauke memiliki potensi lahan dan komoditas lokal yang besar, pemanfaatannya belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dalam kebijakan pangan daerah. Efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti komitmen pemerintah dan dukungan kelembagaan, namun terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, fragmentasi koordinasi, dan tantangan sosial-budaya, termasuk perbedaan persepsi mengenai pemanfaatan lahan antara pemerintah dan komunitas adat. Selain itu, partisipasi masyarakat dan peran komunitas adat belum optimal, meskipun memiliki potensi strategis dalam mendukung sistem pangan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan di Merauke memerlukan model implementasi yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas-aktor, integrasi kearifan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, serta perbaikan infrastruktur sebagai langkah penting menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Kebijakan Pangan, Sumberdaya Lokal, Ketahanan Pangan, Partisipasi Komunitas, Implementasi Kebijakan.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of local resource-based food policy in Merauke Regency by examining its suitability to the region's social, cultural, and ecological characteristics. Using a qualitative approach with a case study design, this study explores the dynamics of policy implementation through in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving the local government, indigenous communities, farmers, and local businesses. The results show that although Merauke has significant land and local commodity potential, its utilization has not been fully integrated effectively into regional food policy. Effective implementation is still influenced by various supporting factors such as government commitment and institutional support, but is hampered by limited infrastructure, human resource capacity, fragmented coordination, and socio-cultural challenges, including differing perceptions regarding land use between the government and indigenous communities. Furthermore, community participation and*

*the role of indigenous communities have not been optimal, despite their strategic potential in supporting the local food system. These findings emphasize that the success of food policy in Merauke requires a more adaptive, inclusive, and contextual implementation model. The study recommends strengthening cross-actor coordination, integrating local wisdom, increasing community capacity, and improving infrastructure as important steps towards sustainable food security.*

**Keywords :** *Food Policy, Local Resources, Food Security, Community Participation, Policy Implementation.*

## A. PENDAHULUAN

### *Policy Implementation.*

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan nasional, terutama di wilayah timur Indonesia yang memiliki karakter geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam (Amin et al., 2024). Kabupaten Merauke menjadi salah satu wilayah strategis karena memiliki sumberdaya lokal yang sangat besar untuk pengembangan pangan, seperti ketersediaan lahan yang luas, potensi pertanian yang tinggi, serta keberadaan komoditas pangan lokal seperti padi, sagu, dan tanaman hortikultura. Potensi ini menempatkan Merauke sebagai salah satu daerah dengan peluang besar untuk memperkuat ketahanan pangan regional maupun nasional. Namun demikian, optimalisasi potensi tersebut sangat bergantung pada implementasi kebijakan pangan yang tepat dan mampu mengakomodasi kondisi lokal (Rikardus, 2025). Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan pangan di Merauke dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya terkait dengan posisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini serta dominasi wilayah adat dengan keunikan sosial-budaya masyarakatnya. Program pemerintah pusat, seperti Lumbung Padi Nasional, telah diarahkan ke Merauke sebagai bagian dari upaya percepatan penyediaan pangan nasional, tetapi dalam

praktiknya sering kali belum sepenuhnya selaras dengan kondisi ekologis, kebutuhan masyarakat lokal, dan kapasitas tata kelola daerah. Hal ini menciptakan kesenjangan antara besar dan beragamnya potensi sumberdaya lokal dengan realisasi pemanfaatannya di lapangan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi implementasi kebijakan pangan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berbasis kekuatan lokal agar Merauke dapat berperan optimal dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan (Nathan, 2025).

Permasalahan penelitian dalam implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke muncul dari ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dengan kondisi sosial-ekologis wilayah tersebut. Kebijakan pangan yang datang dari tingkat pusat sering bersifat seragam dan kurang mempertimbangkan karakteristik khusus Merauke, seperti ekosistem lahan basah, musim tanam yang berbeda dengan wilayah lain, serta pola hidup masyarakat adat yang bergantung pada sumberdaya alam. Kondisi ini menyebabkan kebijakan sulit dioperasionalkan secara optimal karena tidak selaras dengan realitas lokal. Selain itu, masih terbatasnya partisipasi komunitas adat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan juga menjadi persoalan krusial (Andriyani & Irfan, 2025). Masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan penjaga

pengetahuan lokal kerap ditempatkan hanya sebagai objek pembangunan, bukan sebagai mitra strategis yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah pengelolaan sumberdaya pangan di wilayahnya. Permasalahan implementasi semakin kompleks dengan adanya lemahnya koordinasi antar-stakeholder yang terlibat dalam sistem pangan daerah. Pemerintah daerah, petani, tokoh adat, lembaga adat, serta pihak swasta sering bekerja dengan pendekatan sektoral tanpa mekanisme kolaborasi yang terintegrasi (Fonataba, 2025). Akibatnya, program pangan berjalan parsial, tumpang tindih, atau bahkan tidak saling mendukung. Tantangan lain yang turut mempengaruhi adalah kondisi infrastruktur pertanian yang belum memadai, seperti jaringan irigasi, jalan produksi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen. Teknologi pertanian yang diterapkan juga sering kali tidak sesuai dengan kondisi lahan di Merauke yang memiliki tingkat kelembapan tinggi dan struktur tanah khas Papua. Kelemahan dalam manajemen sumberdaya lokal, termasuk kurangnya sistem pendataan potensi lahan dan minimnya pelatihan teknis bagi petani lokal, semakin memperburuk efektivitas kebijakan. Semua faktor ini mencerminkan bahwa implementasi kebijakan pangan di Merauke masih menghadapi hambatan multidimensi yang harus ditangani melalui pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan terpadu.

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan model implementasi kebijakan pangan yang lebih kontekstual dan berbasis potensi lokal, khususnya di Kabupaten Merauke yang memiliki karakteristik sosial, ekologis, dan kultural yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Pendekatan kebijakan yang

bersifat generik tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas pengelolaan pangan di daerah yang memiliki luas lahan signifikan, dominasi kawasan adat, serta ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam. Oleh karena itu, diperlukan model implementasi yang mampu mengakomodasi kondisi biofisik Merauke, kapasitas masyarakat lokal, serta dinamika sosial komunitas adat dalam mengelola lahan dan komoditas pangan. Model yang kontekstual ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran, operasional, dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini memiliki urgensi tinggi karena berkaitan langsung dengan isu keberlanjutan, inklusi sosial, dan kedaulatan pangan di wilayah perbatasan. Kabupaten Merauke bukan hanya merupakan bagian dari wilayah pangan strategis, tetapi juga merupakan daerah dengan nilai geopolitik tinggi karena berbatasan dengan Papua Nugini. Pengelolaan pangan yang berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sementara inklusi sosial menjadi krusial untuk memastikan bahwa komunitas adat sebagai pemilik hak ulayat tidak tersisih dari proses pembangunan. Kajian ini juga berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakter lokal, sehingga hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah, institusi kebijakan, dan para pemangku kepentingan untuk menyusun langkah strategis yang mampu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Merauke.

Kesenjangan penelitian dalam implementasi kebijakan pangan berbasis

potensi lokal di Kabupaten Merauke terlihat dari minimnya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis potensi sumberdaya lokal dengan evaluasi efektivitas kebijakan pangan yang berjalan. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek produksi atau program teknis, sehingga mengabaikan dimensi kebijakan, sosial, dan tata kelola yang menentukan keberhasilan implementasi di lapangan. Selain itu, belum banyak penelitian yang menempatkan komunitas adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pangan, padahal mereka memegang peran sentral sebagai pemilik lahan adat dan penjaga pengetahuan lokal. Penelitian berbasis studi kasus yang secara spesifik menggambarkan dinamika ekonomi, sosial, dan ekologis Merauke juga masih terbatas, sehingga pemahaman terhadap konteks lokal belum terakomodasi secara memadai dalam perumusan kebijakan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian mendalam yang tidak hanya melihat kebijakan dari aspek formal, tetapi juga memahami realitas lokal secara holistik untuk menghasilkan kebijakan pangan yang lebih tepat guna dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke dengan melihat sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai konteks sosial-ekologis wilayah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, baik dari aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, infrastruktur, maupun kapasitas sumberdaya manusia. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyusun rekomendasi kebijakan yang

lebih adaptif, berkelanjutan, dan selaras dengan potensi sumberdaya lokal guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif dinamika sosial, budaya, dan ekologis yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Melalui desain studi kasus, penelitian difokuskan pada analisis proses implementasi kebijakan, pola interaksi antar-stakeholder seperti pemerintah daerah, komunitas adat, petani, dan sektor swasta, serta bagaimana sumberdaya lokal dimanfaatkan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke dengan fokus pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat pelaksanaan program kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Merauke sebagai daerah dengan potensi pertanian yang besar serta keterlibatan komunitas adat dalam pengelolaan sumberdaya pangan. Kegiatan penelitian berlangsung selama Mei hingga Agustus 2025, mencakup tahap observasi awal, pengumpulan data lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta validasi temuan. Subjek penelitian meliputi berbagai aktor utama yang terlibat dalam implementasi kebijakan, antara lain pejabat pemerintah daerah, unsur dinas pertanian dan pangan, pemimpin komunitas adat, petani, pelaku usaha lokal, serta pihak-

pihak lain yang relevan. Keberagaman subjek ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan, koordinasi antar-stakeholder, serta efektivitas pemanfaatan potensi sumberdaya lokal dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Merauke.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke. Pertama, dilakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk pejabat pemerintah daerah, dinas terkait, pemimpin komunitas adat, petani, dan pelaku usaha lokal, guna menggali perspektif, pengalaman, serta dinamika yang mereka hadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, dilakukan observasi lapangan pada lokasi-lokasi yang menjadi pusat implementasi kebijakan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, termasuk pola pemanfaatan sumberdaya lokal dan interaksi antar-stakeholder. Ketiga, penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen seperti kebijakan pemerintah, laporan program, rencana pembangunan daerah, serta data pendukung lainnya untuk memperkuat analisis serta memvalidasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini disusun untuk mendukung proses pengumpulan data secara sistematis dan mendalam. Pertama, pedoman wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memandu proses wawancara dengan para pemangku kepentingan, sehingga

peneliti dapat mengeksplorasi topik secara fleksibel namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Kedua, lembar observasi lapangan disiapkan untuk mencatat temuan-temuan penting selama pengamatan langsung pada lokasi implementasi kebijakan, termasuk kondisi lingkungan, aktivitas pemanfaatan sumberdaya lokal, serta interaksi antar-aktor yang terlibat. Ketiga, template analisis dokumen digunakan untuk menelaah berbagai dokumen kebijakan, laporan program, dan data pendukung lainnya secara sistematis, sehingga informasi yang diperoleh dapat diorganisasi dan dianalisis sesuai tema penelitian. Instrumen-instrumen ini membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pangan berbasis potensi lokal, termasuk faktor pendukung dan hambatan yang muncul di lapangan. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, di mana data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta disusun sesuai fokus penelitian; penyajian data, yang melibatkan pengorganisasian informasi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks tema untuk mempermudah pemaknaan; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi dan akurasi interpretasi data. Selain itu, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan validitas temuan, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data agar hasil penelitian lebih objektif dan terpercaya.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan temuan-temuan utama terkait implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke, yang diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Temuan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat daerah, bagaimana aktor-aktor lokal berperan, serta bagaimana

sumberdaya lokal dimanfaatkan dalam mendukung ketahanan pangan. Selain itu, hasil penelitian juga mengungkap berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, serta dinamika koordinasi antar-stakeholder dalam proses pelaksanaannya. Seluruh temuan ini disusun untuk menjawab tujuan penelitian dan memberikan dasar yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Sajian Data Implementasi Kebijakan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Merauke

Aspek	Data Temuan Lapangan
Total lahan potensial pangan	1,2 juta hektare
Lahan yang sudah dimanfaatkan dalam program	480.000 hektare (40%)
Realisasi tiga program utama pemerintah	61,7% dari target tahunan
Pola tanam petani	58% tradisional; 42% modern (pelatihan pemerintah)
Jumlah demplot sagu yang tersedia	8 unit
Demplot sagu yang berfungsi aktif	3 unit
Jumlah ketua kelompok tani yang diwawancarai	12 orang

Sajian data menunjukkan bahwa dari total 1,2 juta hektare lahan potensial pangan di Kabupaten Merauke, hanya 480.000 hektare (40%) yang telah dimanfaatkan dalam program pengembangan pangan daerah. Dari tiga program utama pemerintah yakni peningkatan produksi padi, revitalisasi sagu, dan pemberdayaan kelompok tani realisasi kegiatan tercatat mencapai 61,7% pada tahun terakhir. Wawancara dengan 12 ketua kelompok tani mengungkap bahwa 58% petani masih

mengandalkan pola tanam tradisional, sementara hanya 42% yang telah mengikuti pelatihan budidaya modern dari pemerintah. Selain itu, observasi lapangan menunjukkan bahwa hanya 3 dari 8 demplot sagu yang berfungsi aktif karena keterbatasan pendampingan teknis dan akses infrastruktur. Data ini menggambarkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi sumberdaya lokal dan keberhasilan implementasi kebijakan pangan di Merauke.



Tabel 2. Pola Pemanfaatan Sumberdaya Lokal dalam Implementasi Kebijakan Pangan di Kabupaten Merauke

Aspek	Data Temuan Lapangan
Persentase lahan potensial yang dimanfaatkan	38%
Distribusi pemanfaatan komoditas unggulan	Padi: 62% ; Sagu: 21% ; Hortikultura: 17%
Keterlibatan komunitas adat dalam pengelolaan lahan	54% kelompok adat terlibat langsung
Pola pengelolaan lahan yang digunakan	Tradisional: 64% ; Modern: 36%
Tingkat adopsi teknologi pertanian modern	36% petani menggunakan teknologi sederhana (traktor mini, pompa air)
Dominasi praktik pertanian	Metode tradisional masih dominan

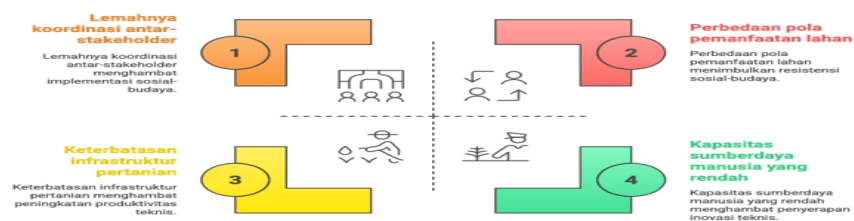
Tabel 2 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya lokal dalam implementasi kebijakan pangan di Kabupaten Merauke masih belum optimal, terlihat dari hanya 38% lahan potensial yang dimanfaatkan secara produktif. Pemanfaatan lahan didominasi oleh komoditas padi (62%), sementara sagu dan hortikultura masih berada pada tingkat yang rendah. Keterlibatan komunitas adat mencapai 54%, namun sebagian besar masih menggunakan pola pengelolaan tradisional (64%), sehingga adopsi teknologi pertanian modern baru mencakup 36% petani. Data ini menegaskan bahwa integrasi antara potensi lokal dengan kebijakan pemerintah belum maksimal, terutama dalam aspek diversifikasi komoditas, modernisasi praktik pertanian, dan pemberdayaan komunitas adat.

Tabel 3. Aktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Merauke

Aktor / Faktor Pendukung	Indikator Dukungan	Temuan Data Lapangan	Skala Kontribusi
Pemerintah Daerah	Komitmen anggaran & kebijakan	Anggaran pangan naik 18% dalam 2 tahun; penetapan kawasan pangan prioritas	Tinggi
Kelembagaan Pertanian (Dinas Pertanian & Dinas Ketahanan Pangan)	Program, pendampingan, dan layanan teknis	6 program aktif: peningkatan produksi, penyediaan sarana, penyuluhan, pendampingan kelompok tani	Tinggi
Sumberdaya Alam Lokal	Luas dan kesesuaian lahan	±700.000 ha lahan produktif untuk padi, sagu, hortikultura	Sangat Tinggi
Komunitas Adat	Tingkat partisipasi & keterlibatan	57% komunitas adat terlibat dalam kegiatan pertanian dan pelatihan pemerintah	Sedang–Tinggi

Tabel 2 menggambarkan bahwa implementasi kebijakan pangan di Kabupaten Merauke didukung oleh empat aktor utama dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen tinggi melalui peningkatan anggaran sebesar 18 persen dan penetapan kawasan pangan prioritas, sementara kelembagaan pertanian seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan turut memperkuat implementasi melalui enam program aktif yang berfokus pada peningkatan produksi dan pendampingan petani. Dari sisi potensi

ekologis, sumberdaya alam lokal memberikan kontribusi sangat tinggi dengan tersedianya sekitar 700.000 hektare lahan produktif yang sesuai untuk berbagai komoditas. Partisipasi komunitas adat juga menunjukkan tren positif, dengan 57 persen kelompok adat terlibat dalam kegiatan budidaya dan pelatihan, meskipun tingkat kontribusinya masih berada pada kategori sedang hingga tinggi. Secara keseluruhan, keberadaan aktor-aktor ini menjadi fondasi penting dalam menggerakkan implementasi kebijakan pangan yang berbasis potensi lokal di Merauke.



Gambar 1. Hambatan Implementasi Kebijakan Pangan Lokal di Merauke

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke terlihat dari lemahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah daerah, komunitas adat, dan sektor swasta, yang sering menimbulkan ketidaksinkronan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keterbatasan infrastruktur pertanian seperti irigasi yang belum merata, akses jalan menuju lahan produksi, serta minimnya fasilitas penyimpanan hasil

panen juga menghambat peningkatan produktivitas. Selain itu, kapasitas sumberdaya manusia masih rendah, terutama dalam penguasaan teknologi dan manajemen pertanian modern, sehingga banyak inovasi tidak terserap secara optimal. Tantangan sosial-budaya semakin memperkuat hambatan, di mana perbedaan pola pemanfaatan lahan antara masyarakat adat dan kebijakan pemerintah kerap menimbulkan kesenjangan pemahaman dan resistensi dalam implementasi kebijakan.



Gambar 2. Kesenjangan Kebijakan Pangan Menghambat Kemandirian



Gambar 2 menggambarkan berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara bertahap. Hambatan pertama adalah ketidaksesuaian model dengan kebutuhan masyarakat adat, yang menyebabkan kebijakan tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi lokal. Hambatan kedua adalah sistem monitoring yang lemah, sehingga intervensi yang telah direncanakan tidak dapat dievaluasi dan dikendalikan secara efektif. Selanjutnya, terdapat ketidakkonsistenan perencanaan, di mana pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak selalu sesuai dengan rencana awal. Hambatan terakhir adalah kemampuan pemerintah yang rendah, yang berdampak pada keterlambatan identifikasi masalah dan respons terhadap dinamika lapangan. Secara keseluruhan, alur panah yang menanjak pada gambar menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan, intervensi yang terkoordinasi secara baik dapat mendorong peningkatan efektivitas implementasi kebijakan.

Analisis kesesuaian kebijakan pangan dengan potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan yang diterapkan masih berorientasi pada pendekatan top-down, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakter sosial, budaya, dan ekologis wilayah setempat. Merauke memiliki struktur sosial unik yang ditandai dengan keberadaan hak ulayat dan pengelolaan lahan berbasis adat, namun kebijakan pangan nasional cenderung menempatkan wilayah ini sebagai kawasan produksi berskala besar tanpa mempertimbangkan mekanisme tata kelola lahan tradisional (Tjilen, Waas, et al., 2023). Ketidaksesuaian tersebut

berimplikasi pada rendahnya efektivitas implementasi program, terutama ketika kebijakan harus berinteraksi dengan norma adat yang bersifat mengikat dalam penggunaan ruang dan sumberdaya (Tambaip & Tjilen, 2023). Dari perspektif ekologis, Merauke memiliki bentang alam yang khas dengan hamparan lahan luas, pola hidrologis musiman, dan tingkat kesuburan tanah yang bervariasi. Namun, beberapa kebijakan pangan yang diterapkan mengadopsi model intensifikasi nasional yang tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi biofisik setempat (Amin et al., 2024). Teknik budidaya yang mensyaratkan ketersediaan irigasi permanen, misalnya, sulit diterapkan di wilayah yang infrastruktur dasarnya belum berkembang secara optimal (Mahiya et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pangan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyesuaikan intervensi kebijakan dengan daya dukung ekologis wilayah.

Pemanfaatan komoditas lokal seperti padi, sagu, dan hortikultura sebenarnya menunjukkan potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan daerah (Tambaip et al., 2023a). Program pangan nasional lebih menekankan pada pengembangan padi sebagai komoditas utama, sementara sagu yang merupakan pangan tradisional masyarakat adat belum mendapatkan perhatian proporsional meskipun memiliki ketahanan tinggi terhadap perubahan iklim dan kondisi lahan marginal. Demikian pula, tanaman hortikultura yang dapat menopang diversifikasi pangan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa kebijakan masih cenderung

berorientasi pada komoditas tertentu dan belum mengoptimalkan keberagaman sumber pangan lokal. Pengetahuan ekologis lokal yang dimiliki komunitas adat juga berperan penting dalam pemanfaatan sumberdaya pangan (Tambaip et al., 2024). Masyarakat adat Merauke memiliki sistem pengetahuan yang kaya terkait pengelolaan sagu, lahan basah, serta teknik budidaya tradisional yang telah terbukti adaptif terhadap lingkungan setempat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan lokal tersebut belum menjadi bagian integral dari perumusan dan implementasi kebijakan pangan. Rendahnya integrasi pengetahuan adat berpotensi memunculkan resistensi serta menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, sehingga menghambat pencapaian tujuan kebijakan (Mubarok et al., 2024).

Kesenjangan antara pendekatan kebijakan pusat dan kebutuhan riil masyarakat terlihat jelas dalam perbedaan orientasi pangan (Rais et al., 2025). Pemerintah pusat mendorong Merauke sebagai pusat produksi padi skala besar, sementara masyarakat lokal lebih mengutamakan diversifikasi pangan yang sesuai dengan budaya konsumsi dan ketersediaan sumberdaya alami. Kesenjangan orientasi ini berdampak pada distribusi manfaat kebijakan yang tidak merata, di mana sebagian kelompok petani menikmati manfaat program padi, sedangkan petani kecil dan komunitas adat tidak memperoleh keuntungan signifikan karena keterbatasan akses lahan, teknologi, dan informasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan pangan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap potensi lokal. Integrasi komoditas lokal seperti sagu

ke dalam skema kebijakan pangan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi (Pecamuya, 2025). Selain itu, peningkatan peran serta komunitas adat dalam proses perencanaan dan pengelolaan program menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pangan di Merauke perlu diarahkan pada model implementasi yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya, ekologis, dan ekonomi lokal agar mampu memberikan dampak pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan (Tjilen, Tambaip, et al., 2023).

Analisis terhadap efektivitas implementasi kebijakan pangan di Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa capaian program di lapangan masih berjalan secara parsial dan belum menghasilkan dampak yang merata bagi masyarakat. Program peningkatan produksi pangan, terutama pada komoditas padi, memang menunjukkan peningkatan pada beberapa wilayah yang memiliki dukungan infrastruktur memadai, namun hasilnya belum signifikan bagi petani kecil dan komunitas adat yang mengandalkan sistem pangan tradisional (Hidayatullah et al., 2025). Produktivitas pangan lokal masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap sarana produksi, perbedaan kapasitas teknis antarpetani, serta ketergantungan terhadap musim yang belum sepenuhnya diantisipasi melalui intervensi kebijakan. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian intervensi dengan kondisi sosial dan ekologis masyarakat penerima manfaat (Tjilen et al., 2024). Evaluasi terhadap efektivitas peran instansi pemerintah dalam

mengoordinasikan implementasi kebijakan menunjukkan adanya kelemahan pada aspek koordinasi lintas lembaga. Meskipun terdapat komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal, koordinasi antar-dinas, lembaga teknis, dan pemerintah kampung belum berjalan optimal. Fragmentasi kelembagaan mengakibatkan tumpang tindih kegiatan, implementasi yang tidak terarah, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi (Tjilen, Waas, et al., 2023). Di sisi lain, peran pemerintah pusat yang dominan dalam mendesain program pangan kerap tidak diimbangi dengan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan, sehingga efektivitas implementasi menjadi terhambat. Ketidakselarasan ini berpengaruh terhadap efektivitas program yang seharusnya dapat berjalan lebih adaptif dan responsif.

Peran teknologi pertanian, dukungan pembinaan, dan akses sarana prasarana menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas kebijakan pangan di Merauke (Rikardus, 2025). Teknologi pertanian modern yang diperkenalkan pemerintah, seperti penggunaan varietas unggul, mekanisasi, dan sistem irigasi sederhana, belum teradopsi secara luas oleh petani lokal karena keterbatasan akses dan kapasitas teknis. Pembinaan dari penyuluh pertanian juga masih terbatas dan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat, terutama komunitas adat yang tinggal jauh dari pusat kegiatan pertanian formal (Tafonao et al., 2024). Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan produksi, fasilitas penyimpanan hasil panen, dan pasar lokal belum memadai untuk mendukung distribusi hasil pertanian secara

efektif. Ketidakmerataan akses terhadap teknologi dan sarana prasarana ini memperlemah kemampuan program untuk menghasilkan dampak yang konsisten dan berkelanjutan. Efektivitas implementasi kebijakan pangan di lapangan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan, dukungan infrastruktur, dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi inovasi pertanian (Soedarto & Ainiyah, 2022). Ketika salah satu elemen tersebut tidak terpenuhi, program menjadi sulit mencapai tujuan yang ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan implementasi yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis pendampingan berkelanjutan agar kebijakan pangan dapat memberikan hasil yang optimal.

Peran aktor lokal, khususnya komunitas adat, menjadi elemen strategis dalam implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke. Komunitas adat memiliki sistem pengetahuan ekologis yang terbentuk melalui interaksi panjang dengan lingkungan, termasuk pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, pengelolaan hutan sagu, dan tata cara bercocok tanam tradisional yang selaras dengan kondisi biofisik setempat (Tambaip et al., 2023a). Pengetahuan ini mencakup pemilihan lokasi tanam, teknik budidaya adaptif, serta pemahaman siklus musim yang sangat relevan untuk menentukan waktu tanam dan panen. Namun demikian, kontribusi strategis tersebut sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam desain kebijakan pangan yang cenderung mengadopsi perspektif modernisasi dan intensifikasi berbasis teknologi, sehingga potensi integrasi antara kebijakan formal dan praktik lokal belum berkembang optimal. Dinamika partisipasi masyarakat

dalam implementasi kebijakan pangan menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan komunitas lokal masih bersifat variatif, tergantung pada mekanisme komunikasi pemerintah dan pola hubungan antara pemangku kepentingan (Tambaip et al., 2023b). Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan kebijakan masih rendah, karena forum deliberatif yang melibatkan masyarakat adat belum sepenuhnya terlembagakan. Pada tahap pelaksanaan, sebagian masyarakat berpartisipasi dalam program pertanian modern seperti peningkatan produksi padi, tetapi partisipasi tersebut cenderung bersifat formalistik dan belum didukung pemahaman mendalam terhadap tujuan program. Sementara itu, pada tahap evaluasi, masyarakat hampir tidak terlibat karena proses evaluasi masih didominasi oleh instansi pemerintah tanpa mekanisme feedback yang sistematis dari komunitas adat maupun kelompok petani kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat belum ditempatkan sebagai mitra sejajar dalam implementasi kebijakan.

Tantangan sosial-budaya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas keterlibatan aktor lokal dalam implementasi kebijakan (Tambaip & Tjilen, 2023). Perbedaan persepsi mengenai pemanfaatan lahan, misalnya, sering menimbulkan gesekan antara kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pengembangan lahan produksi skala besar dan komunitas adat yang memprioritaskan pemanfaatan lahan secara komunal dan berkelanjutan. Persepsi masyarakat terhadap intervensi kebijakan pemerintah juga dipengaruhi oleh pengalaman historis terkait program yang tidak sepenuhnya berhasil atau tidak memberikan manfaat

nyata bagi mereka. Ketika masyarakat memandang kebijakan pangan sebagai inisiatif eksternal yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tingkat kepercayaan menurun, yang berimplikasi pada rendahnya adopsi teknologi, partisipasi program, dan komitmen jangka panjang (Tjilen et al., 2021). Selain itu, relasi kekuasaan antara pemerintah daerah, petani kecil, dan komunitas adat turut membentuk dinamika penerimaan kebijakan. Kecenderungan pemerintah untuk menggunakan pendekatan birokratis sering kali mengurangi ruang dialog dan negosiasi, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Hambatan bahasa, perbedaan nilai, dan ketidaksesuaian prioritas pembangunan semakin memperlemah interaksi antara pemerintah dan masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan memandang kebijakan pangan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan sistem pangan tradisional, terutama ketika program tersebut mendorong peralihan dari pangan lokal seperti sagu menuju komoditas komersial yang tidak selalu sesuai dengan pola konsumsi mereka (Phoek & Tjilen, 2019).

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pangan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan peran komunitas adat sebagai aktor kunci dalam sistem pangan lokal. Peningkatan efektivitas kebijakan hanya dapat dicapai apabila pemerintah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, membuka ruang dialog yang setara, dan menghargai kearifan lokal sebagai basis pengetahuan yang sah. Penguatan mekanisme partisipasi, fasilitasi yang sensitif budaya, serta pengembangan

model kebijakan berbasis kolaborasi antaraktor menjadi langkah penting untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan pangan (Pecamuya, 2025). Dengan demikian, integrasi antara kebijakan formal dan praktik lokal menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke.

Implementasi kebijakan peningkatan ketahanan pangan menghadapi berbagai hambatan struktural yang memengaruhi efektivitas program di tingkat lapangan. Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses transportasi menuju lokasi produksi dan ketersediaan fasilitas irigasi, masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat distribusi input produksi serta mobilisasi hasil panen. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, terutama terkait kemampuan teknis dan manajerial dalam mengelola pertanian skala besar, turut memperlambat proses adopsi inovasi. Ketersediaan teknologi juga belum sepenuhnya memadai, ditandai dengan rendahnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi produksi. Kendala koordinasi antar-stakeholder menjadi penghambat signifikan lainnya dalam implementasi kebijakan. Fragmentasi kelembagaan antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga pendukung menyebabkan ketidaksinkronan dalam penyaluran program, perbedaan prioritas, dan tumpang tindih kewenangan.

Kondisi ini menurunkan efektivitas mekanisme komunikasi, memperpanjang proses pengambilan keputusan, serta membatasi aliran informasi yang diperlukan untuk respons kebijakan yang cepat dan adaptif (Syahrudin et al., 2023). Ketidakterpaduan tersebut juga berdampak

pada lemahnya monitoring dan evaluasi, yang semestinya menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi program di lapangan. Hambatan sosial-budaya turut memberikan tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks wilayah yang memiliki komunitas adat dengan sistem nilai dan praktik pemanfaatan lahan yang khas. Perbedaan konsep penggunaan ruang antara pemerintah dan masyarakat adat kerap menimbulkan resistensi terhadap intervensi kebijakan, terutama jika proses konsultasi publik tidak dilakukan secara inklusif. Persepsi masyarakat mengenai tujuan dan manfaat program sering kali tidak sejalan dengan pendekatan pemerintah, sehingga memunculkan ketidakpercayaan serta keterlibatan yang rendah dalam pelaksanaan program. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh sensitivitas terhadap dimensi sosial dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat lokal.

Temuan penelitian memberikan implikasi penting bagi arah kebijakan ketahanan pangan di Merauke dengan menegaskan perlunya pendekatan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal, termasuk karakter sosial-budaya masyarakat adat dan kondisi geografis wilayah perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya memperkuat kedaulatan pangan tidak hanya bergantung pada intervensi teknis dan program pemerintah, tetapi juga pada kemampuan kebijakan untuk berinteraksi dengan pengetahuan lokal, pola pemanfaatan lahan tradisional, dan dinamika partisipasi masyarakat. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, seperti Edwards

III serta Mazmanian dan Sabatier, konteks Merauke memperkaya pemahaman mengenai peran komunikasi, dukungan sumber daya, karakteristik kebijakan, dan komitmen aktor dalam menentukan keberhasilan implementasi, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan pangan berbasis lokal memerlukan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan model implementasi konvensional. Temuan ini turut memberikan kontribusi akademik dengan menegaskan pentingnya pembangunan berbasis potensi daerah sebagai pendekatan strategis bagi wilayah adat dan perbatasan. Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi penguatan kebijakan diarahkan pada penyusunan model implementasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memperkuat kolaborasi lintas-aktor, serta memberikan ruang bagi komunitas adat sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan lahan dan pengembangan sistem pangan lokal sehingga kebijakan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berorientasi jangka panjang.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke masih berada pada tahap perkembangan yang memerlukan penguatan secara sistematis. Meskipun Merauke memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, termasuk lahan pertanian luas dan komoditas lokal seperti padi dan sagu, pemanfaatannya belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pangan yang berlaku. Efektivitas implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti komitmen pemerintah daerah dan dukungan

kelembagaan, namun masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, terutama keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumberdaya manusia, dan minimnya koordinasi antar-stakeholder. Partisipasi masyarakat dan komunitas adat menunjukkan peran penting, namun belum optimal dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan. Dinamika sosial-budaya, perbedaan pandangan terhadap penggunaan lahan, serta kurangnya pendekatan adaptif menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kebijakan pangan yang sesuai dengan karakter lokal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pangan di Merauke membutuhkan model kebijakan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berbasis potensi lokal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar-aktor, peningkatan kapasitas masyarakat dan SDM pertanian, perbaikan infrastruktur pendukung, serta integrasi pengetahuan lokal dalam perumusan kebijakan. Upaya tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Merauke.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Amin, L., Budiman, L., & Suhendi, D. (2024). Resiliensi penguatan ketahanan pangan daerah di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium*, 1(2), 63–77.
- Andriyani, S., & Irfan, M. (2025). Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Di



- Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Private Law*, 5(3), 970–980.
- Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1376–1395.
- Hidayatullah, M. A., Sundari, U. Y., & Girindraswari, N. A. (2025). Pengelolaan Potensi Sumber Daya Tanaman Pangan Berbasis Pengetahuan Ekologi Rawa Gambut untuk Penguatan Pangan Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian UPR*, 5(1), 17–25.
- Mahiya, V. I., Mumtaz, M. Y., Salsabila, D. A., & Sadhya, P. C. (2024). Penerapan Sistem Pertanian Aquaponik sebagai Bentuk Resiliensi Kesulitan Irigasi Air di Desa Sukoanyar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 38–52.
- Mubarok, A., Alviana, A., Marselina, F. P., Febriansyah, M. A. B., Shabrina, S., & Gayatri, T. I. (2024). Perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 69–77.
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591.
- Pecamuya, R. (2025). Dampak Kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap Ketahanan Pangan Lokal: Perspektif Masyarakat Adat Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 74–80.
- Phoek, I. C. A., & Tjilen, A. P. (2019). Empowerment of Indigenous People in Local Wisdom for the Use of Indigenous Forest Management. *International Journal of Management and Human Science (IJMHS)*, 3(3), 32–38.
- Rais, L., Halik, W., Taopan, A., Rumodar, M., Yanyaan, R. R., & Saiba, R. L. (2025). Keadilan Sosial dalam Pembangunan: Tinjauan Literatur Terhadap Kebijakan Pembangunan dengan Adanya Efisiensi Anggaran dari Pusat. *Papua Journal of Sociology (PJS)*, 3(1), 38–55.
- Rikardus, E. (2025). Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan: Sinergi Multi-Pemangku Kepentingan dalam Peningkatan Produksi Padi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 302–315.
- Soedarto, T., & Ainiyah, R. K. (2022). *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syahrudin, S., Tambaip, B., Tjilen, A. P., Riyanto, P., Jalal, N., Moento, P. A., Prasetya, M. N., & Enala, S. H. (2023). Membangun Karakter Positif dan Kepemimpinan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Merauke. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 95–105.
- Tafonao, F., Halawa, N., Telaumbanua, E., Laoli, N. S., & Lase, N. K. (2024). Inovasi Agroteknologi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Keberlanjutan Pertanian di Kepulauan Nias. *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan*, 1(2), 14–

- 21.
- Tambaip, B., Riyanto, P., Tjilen, A. P., Negara, I. A., & Musamus, U. (2024). *Penguatan Sistem Manajemen SDM untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan di Lingkungan Desa*. 1(10), 1611–1619.
- Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Analisis Kebijakan Publik dalam Derajat Kesehatan di Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 101–110.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023a). Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 97–106.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023b). Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 5(1), 1–9.
- Tjilen, A. P., Ririhena, S. W., & Manuhutu, F. (2021). Model Ecotourism-Based Tourism Development Strategy and Empowerment of Local Communities in Merauke Regency. *Journal of Economics, Trade and Marketing Management*, 3(01), 48–59.
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., Dharmawan, B., Adrianus, A., Riyanto, P., & Ohoiwutun, Y. (2024). Engaging stakeholders in policy decision-making for food security governance: Identification, perception, and contribution. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 8(1), 144–154. <https://doi.org/10.22495/cgobrv8i1p12>
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., Waas, R. F. Y., Moento, P. A., & Purnama, E. N. (2023). Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 257–262.
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.